

Eksplorasi Sumber Daya Timah yang Berorientasi pada Pemaksimalan Hasil dalam Perspektif Teori Sosial Kritis Mazhab Frankfurt

Herza Herza¹, Nur Faizza Tunnisa², Tiara Ramadhani³, Budi Darmawan⁴, Chelsea Nova⁵

¹ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: herzazul@ubb.ac.id

² Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: zazapkp11@gmail.com

³ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: tiaramadhani30@yahoo.co.id

⁴ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: budidarmawan@ubb.ac.id

⁵ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: novachelsea5@gmail.com

Abstract. *This paper focuses on how the massive tin mining activities in Bangka Island are analyzed through the lens of the critical social thought of the First Generation Frankfurt School, particularly the ideas of Horkheimer and Adorno. The main objective is to critically explain why tin resource exploitation practices tend to prioritize output and/or technology to extract as much tin as possible in the shortest possible time. This study employs a qualitative approach using a literature review method, elaborated with field observations conducted over a period of three to four months in early 2025. The findings demonstrate the continued relevance of Adorno and Horkheimer's theoretical framework in critically explaining the phenomenon of tin exploration in Bangka, which remains oriented toward output maximization. The analysis reveals that the root cause of such a phenomenon lies in the underlying rationality of the actors involved in the mining process—whether the state through PT Timah or local elites—namely what Horkheimer refers to as instrumental rationality and Adorno as technological rationality. This mode of reasoning, which privileges effectiveness and efficiency in the extraction process, consequently leads to environmental degradation and the deprivation of others' livelihoods. The evidence of such destruction includes unreclaimed mining pits (kolong), damaged mangrove ecosystems, marine pollution, and unequal distribution of profits between miners and their 'bosses.'*

Keywords : Tin; Frankfurt School; Instrumental Rationality; Bangka

Abstrak. *Tulisan ini fokus pada bagaimana eksplorasi sumber daya timah yang massif di Pulau Bangka dianalisis dengan pemikiran sosial kritis Mazhab Frankfurt Generasi Pertama, yakni pemikiran Horkheimer dan Adorno. Tujuannya untuk memberikan penjelasan secara kritis mengapa bisa terjadi praktik eksplorasi sumber daya timah yang seolah hanya mementingkan hasil dan/atau teknologi untuk mengeruk timah sebanyak dan secepat mungkin. Tulisan ini digarap menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dielaborasi dengan proses pengumpulan data melalui observasi lapangan selama 3-4 bulan di tahun 2025 awal. Hasil analisis menunjukkan bagaimana masih relevannya pemikiran Adorno dan Horkheimer untuk memberikan penjelasan mendasar dan kritis terhadap fenomena eksplorasi timah di Bangka yang berorientasi kepada pemaksimalan hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber dari terjadinya fenomena yang dimaksud adalah karena basis dari cara pandang atau rasio pihak yang menambang timah, baik itu oleh negara melalui PT Timah, maupun oleh elit lokal, adalah apa yang disebut Horkheimer dengan rasionalitas instrumental dan oleh Adorno sebagai Rasionalitas teknologis. Rasio yang semata-mata mengutamakan dimensi efektif dan efisien dalam proses eksplorasinya, yang kemudian menyebabkan kerusakan alam ataupun merampas hak hidup orang lainnya. Bukti kerusakan yang dimaksud seperti banyaknya kolong bekas tambang yang tidak direklamasi, kerusakan mangrove, pencemaran laut, hingga menghasilkan fenomena ketidakadilan pendistribusian hasil di antara para penambang dan 'bosnya'.*

Kata Kunci : Timah; Mazhab Frankfurt; Rasionalitas Instrumental; Bangka

PENDAHULUAN

Pulau Bangka terkenal dengan sumber daya timah-nya yang melimpah ruah, yang tersebar di darat, sungai dan laut. Hampir seluruh wilayah Pulau Bangka dianugerahi biji hitam yang menjadi salah satu komponen penting dalam perkembangan dan kemajuan seabrek teknologi (materil) yang kita nikmati hari ini. Salah satu konsekuensi dari hadirnya sumber daya timah ini menyebabkan sebagian besar Pulau Bangka menjadi arena pertambangan, baik legal maupun illegal.

Pertambangan timah di Pulau Bangka pada dasarnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut beberapa referensi, pertambangan timah sudah dimulai sejak masa sebelum kolonialisme, yakni ketika Bangka masih di bawah kuasa kesultanan Palembang. Belanjut terus hingga masa penjajahan di bawah kolonial Belanda sampai dengan Jepang di pertengahan abad ke-20. Secara regulasi, setiap masa rezim kuasa atas timah, memeberlakukan kebijakan yang ketat. Pada pemerintahan Indonesia setelah merdeka, keketatan dalam penggalian biji timah ini khususnya terjadi di antara tahun 1970-an-1998 (Ibrahim, dkk. 2018; Irawan, 2015).

Perlu diketahui bahwa, di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, secara legal ada dua perusahaan tambang yang aktif mengeruk timah di Pulau Bangka, yakni PT. Timah Tbk. (BUMN) dan PT. Kobatin (Penanaman Modal Asing). Di samping itu, masyarakat lokal, khususnya para elit juga turut aktif mengeruk timah lewat Tambang Inkonsvensional (TI), baik di darat, sungai maupun di laut.

Sampai saat ini, kondisi tersebut terus berlangsung. Hanya saja perbedaannya komoditas timah tidak lagi sebanyak dahulu (bahkan menurut beberapa pihak, Bangka sudah menghadapi fase pasca timah). Kemudian, selain para elit yang masih aktif melakukan pertambangan, saat ini hanya ada satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih aktif beroperasi, yakni PT. Timah Tbk. Adapun wilayah yang dominan di tambang sekarang adalah wilayah laut dan sungai, meski tetap di daratan juga masih terus digarap, khususnya oleh masyarakat secara umum ataupun elit lokal (PT. Timah sendiri saat ini lebih fokus ke laut).

Dalam proses pengeksplorasi timah dari awal ditambang, proses peleburan, hingga ke tahapan penjualan atau ekspor, yang tahapan atau sistem ini biasa dengan tata niaga timah, nyatanya sarat akan problematika. Bahkan kerap kali dalam prosesnya ini menunjukkan adanya intrik, penyelewengan, dan korupsi. “Gongnya” adalah kehebohan berita sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2025 ini yang berkenaan dengan ditangkapnya sejumlah elit yang “bermain kotor” dalam tata niaga timah. Dari 22 orang tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah di Pulau Bangka sebagaimana yang dikabarkan di banyak media, akhirnya terpublish beberapa nama besar yang didakwa secara sah melakukan tindak pidana korupsi tata niaga timah. Mereka adalah Thamron (alias Aon) yang dikenal sebagai pengusaha besar timah di Pulau Bangka, dua petinggi CV Venus Inti Perkasa, yakni Achmad Albani dan Hasan Tjhie, pengepul biji timah Kwan Yung Alias Buyung, Hendry Lie selaku beneficiary owner PT Tinindo Inter Nusa atau PT TIN, Hervey Mouis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka TIN (RBT), dan Helena Lim (Manajer PT Quantum Skyline) (Abdurrahman, 2024; Fadly dkk., 2024; Kamil, 2024). Para elit ini dinilai telah merugikan negara sebesar Rp. 300 triliun, setelah sebelumnya dikatakan kerugian lingkungan yang diakibatkan korupsi tata niaga timah ini senilai 270 triliun (perhitung Prof. Bambang Hero Suharjo dari ITB).

Apa yang terjadi menunjukkan bagaimana para pengusaha timah atau elit tambang melakukan eksploitasi sumber daya timah terus-menerus, kejar keuntungan maksimal (meski melanggar hukum), dan akhirnya merugikan negara senilai ratusan triliun rupiah. Di sisi lain, realitas tambang semakin ironis, ketika bicara mengenai dampak dari aktivitas pertambangan yang masif dilakukan di Pulau Bangka sejak dulu, baik dari sisi dampak lingkungan maupun sosial, sering kali menunjukkan suatu pengabaian. Hal ini nantinya akan dibahas secara cukup panjang lebar di bagian pembahasan.

Fenomena eksploitasi secara masif dan berlangsung lama terhadap sumber daya timah, khususnya mengenai cara pandang para kapitalis pertambangan, baik pihak perusahaan BUMN, swasta, para elit lokal yang menambang secara ilegal maupun pihak pemerintah daerah yang punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan politik terhadap alam (khususnya timah) akan dikaji dengan memakai pemikiran aliran kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama. Lebih khususnya pada

bagian bagaimana mereka memandang rasionalitas yang muncul sejak fase pencerahan atau dengan kata lain bagaimana mereka melakukan kritik terhadap rasionalitas masyarakat modern yang pada akhirnya memunculkan fenomena dominasi atas alam dan manusia lainnya (Hardiman, 1990; Agger, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dan dilengkapi dengan proses penggalian informasi secara empiris melalui observasi non partisipan selama 3-4 bulan di awal tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, tulisan ini bisa menggali, memahami, dan menghasilkan secara eksploratif suatu kebenaran fenomena sosial dengan menyeluruh dan mendalam tentang potret eksplorasi sumber daya timah yang terjadi di Pulau Bangka. Studi pustaka sebagai metode utama digunakan, untuk mengumpulkan sumber informasi dan data yang luas, kritis, dan terpercaya melalui telaah sumber-sumber tertulis maupun dalam format digital seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan hasil penelitian, video dan foto dokumenter, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi pustaka juga digunakan untuk mencari fondasi dasar dan utama dalam memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, menentukan hipotesis dan analisis matang sehingga penulis dapat menjawab rumusan masalah penelitian (Kartiningrum, 2015; Nazir, 2015).

Sementara itu penggalian informasi secara empiris dalam konteks penelitian ini lebih kepada menggunakan teknik observasi terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan wilayah tambang secara umum. Analisis data dilakukan sesuai tahapan analisis tematik menurut Creswell (2014), yakni dimulai dari organizing and preparing data (mengorganisasikan data), membaca dan menelaah data, proses coding atau pemberian kategori, pengembangan tema sesuai kategori, mendeskripsikan tema dan menafsirkan makna, dan terakhir menyusun narasi serta mendisplay data dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Eksplorasi Sumber Daya Timah yang Hanya Berorientasi Pemaksimalan Hasil sebagai Buah dari Penggunaan Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Berbagai dimensi kehidupan masyarakat modern, seperti: seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik dan kebudayaan pada umumnya bagi Adorno, Horkheimer dan Marcuse telah menjadi rancu karena diselubungi ideologi-ideologi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sekaligus mengasingkan manusia individual di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, melalui teori kritisnya mereka bermaksud mengkritik pelbagai persoalan tersebut yang kemudian terkenal dengan aliran yang berupaya merumuskan teori kritis yang bersifat emansipatoris (Hardiman, 1990).

Persoalan yang didera masyarakat modern menurut mereka tidak terlepas dari pencerahan yang diagung-agungkan sebagian besar orang, khususnya para teoretikus dan filsuf modern. Setelah mengalami yang katanya pencerahan, manusia dengan mengandalkan dan memerdekakan pengetahuannya berusaha mengatasi mitos-mitos irasional dan menguasai alam sepenuhnya. Cara memandang atau berpikir yang demikian itu yang kemudian disebut sebagai rasionalitas.

Melalui rasionalitas ini, kebiasaan yang sebelumnya membelenggu cara manusia memahami alam yang condong irasional (yang masih percaya dan takluk akan roh-roh, jin-jin dan dewa-dewi) berubah menjadi cara yang penuh dengan kalkulasi atau perhitungan akan kegunaan. Dengan kata lain, manusia melalui rasionya sendiri bangkit memerintah alam, di mana alam menjadi objek yang dimanipulasi dan harus dikuasai (Hardiman, 1990; Agger, 2017). Dalam hal ini Adorno dan Horkheimer mengatakan ilmu-ilmu pasti dan ilmu-ilmu alam yang telah membantu manusia memahami alam secara rasional dan karenanya juga dapat mengendalikan alam secara matematis (Hardiman, 1990). Berikut kutipan menarik terkait pandangan Adorno dan Horkheimer tentang pencerahan yang tertuang dalam bukunya *Dialectic of Enlightenment* (1973):

“Pencerahan berkelakuan terhadap benda-benda seperti seorang diktator terhadap rakyatnya (juga sebaliknya). Ia mengetahui benda-benda itu sejauh ia dapat memanipulasi benda-benda itu (Adorno dan Horkheimer, 1973)

Adorno dan Horkheimer kemudian dalam bukunya *Eclipse of Reason* (1947) menyebutkan rasionalitas pencerahan (yang menghasilkan cara berpikir positivistic) ini sebagai *Zweckrationalitat* (rasionalitas tujuan) atau yang lebih dikenal dengan rasionalitas instrumental. Dalam rasionalitas hasil pencerahan ini, rasio menjadi kehilangan “isi” dan tujuan pada dirinya sendiri untuk memahami kenyataan dan hanya menjadi prinsip-prinsip belaka. Rasio menjadi netral dan dapat dipakai demi tujuan-tujuan di luar dari nya. Dengan kata lain, rasio menjadi instrumental belaka. Rasio menjadi tukang atau alat kalkulasi, alat verifikasi, pelayan klasifikasi, yang setia pada tujuan-tujuan di luar darinya. Adorno dan Horkheimer menyimpulkan, karena netralitasnya maka rasionalitas instrumental ini tunduk pada macam-macam tujuan dan dapat dipakai oleh siapa saja (Hardiman, 1990).

Pengejahwantahan rasionalitas instrumental dalam dominasi alam dan “manusia lainnya” terus terjadi dan bahkan dari waktu ke waktu, cara, alat dan sistem yang digunakan dalam mendominasi dan memanipulasi tersebut semakin canggih. Terjadinya eksploitasi sejak ratusan tahun terhadap timah di Pulau Bangka merupakan salah satu contoh pemakaian ataupun wujud dari hadirnya rasionalitas instrumental oleh manusia (pengusaha tambang dan pengusaha alat berat, para elit, bahkan pemerintah) dalam mendominasi alam dan manusia lainnya.

Dengan alat ataupun teknologi pertambangan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu (yang notabene buah dari ilmu saintifik dan teknologi), pengerukan atas timah semakin masif mereka lakukan, baik itu di darat, sungai, maupun laut. Selain itu, kebijakan penguasa dan produk hukum yang terus berganti selama ratusan tahun juga turut berkontribusi dalam mengeksploitasi timah. Berdasarkan sejarah eksplorasi timah, pada masa Kesultanan Palembang sumber daya timah menjadi berkah bagi masyarakat lokal karena pada saat itu timah masih ditambang secara tradisional dan pembagian keuntungan menggunakan sistem kongsi. Pada masa ini masyarakat lokal boleh menambang dan terjadi diversifikasi mata pencaharian selain petani. Ketika kekuasaan timah jatuh ke tangan kolonialisme Inggris dan Belanda, keadaan berubah. Timah tidak lagi boleh ditambang oleh penduduk lokal, sebaliknya pemerintah kolonialisme mengimpor orang-orang china dari negara asalnya Tiongkok untuk menjadi buruh timah sehingga menutup berkah ekonomi timah bagi penduduk Bangka. Pada tiga periode kekuasaan ini, kondisi kerusakan lingkungan akibat timah sudah terasa bagi penduduk lokal dan hutan tropis asli.

Lanjut pada masa kemerdekaan di mana pertambangan timah seluruhnya dikuasai oleh negara lewat perusahaan nasional yakni PN Timah (sekarang PT Timah Tbk) dan perusahaan swasta yaitu PT Koba Tin. Namun, pada tahun 1999 terjadilah sebuah momen bersejarah dan penting bagi perjalanan timah yang dilandaskan pada rasionalitas instrumental yaitu dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 yang mencabut timah sebagai komoditas strategis negara dan disusul Keputusan Menperindag Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang menyebutkan bahwa tata niaga komoditas timah sebagai barang yang tidak lagi diatur. Selain itu, adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan desentralisasi kekuasaan bagi pemerintah daerah telah mendorong pemerintah daerah Bangka yang pada saat itu baru terbentuk menjadi provinsi baru merespon keputusan menteri dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 21 pada tahun 2001 oleh Bupati Bangka yang membolehkan masyarakat lokal Bangka menambang timah. Meminjam istilah Erwiza Erman (2010), ini menjadi titik awal liberalisasi timah di Bangka Belitung.

Pada awalnya liberalisasi timah diperuntukkan untuk meningkatkan kesempatan bagi penduduk lokal untuk merasakan dan menikmati berkah dari potensi timah di tanah sendiri yang sejak ratusan tahun tertutup oleh kebijakan penguasa yang terus berganti (Erman, 2010). Namun, dengan menggunakan nalar rasionalitas instrumental, manusia mulai memanipulasi alam dan bagi manusia yang kurang beruntung mereka juga menjadi sasaran manipulasi oleh manusia-manusia dari

kelas tertentu yang memiliki kuasa dan kekuatan (modal, relasi, pengalaman) dengan rakus. Dengan liberalisasi timah, banyak muncul perusahaan-perusahaan timah lokal yang memiliki izin tambang selain dua perusahaan nasional yang telah dulu mengeksploitasi timah di Pulau Bangka. Selain itu, muncul juga pertambangan rakyat yang dikenal dengan Tambang Inkonvensional (TI) dan juga perusahaan milik pemerintah yaitu perusahaan daerah (Perusda) yang juga ikut mengambil keuntungan dari surga timah di tanah Bangka Belitung.

Mengenai dampak yang diakibatkan pertambangan hanya sekadar saja mereka pikirkan. Dengan kata lain orang-orang ini tidak begitu peduli sejauh dampak itu tidak memperhambat proses mereka dalam melakukan pengerukan timah. Kalaupun dituntut untuk bertanggung jawab, mereka-mereka ini mempunyai cara-cara tertentu untuk melepaskan tanggung jawab itu sehingga tidak mengganggu proses eksplorasi (bahkan eksploitasi) terhadap timah. Sebagai contoh survei yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya pada tahun 1998/1999 menjelaskan bahwa PT Timah Bangka Tbk telah meninggalkan 887 kolong (lubang besar bekas galian timah) dengan luas 1,712.65 hektar dan yang direklamasi hanya sebanyak 162 kolong atau 18,2% dari total keseluruhan. Selain itu, tambang inkonvensional yang bersifat ilegal tidak dikenakan kewajiban reklamasi seperti tambang konvensional. Hal ini menjadi celah bagi banyak aktor untuk keluar dari tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan pasca tambang. Misalnya, para penambang TI sering kali menjual hasil bijih timah ke pada perusahaan, dalam hal ini perusahaan merasa diuntungkan karena mereka bisa memperoleh bahan baku bijih timah tanpa harus dibebankan oleh segala tanggung jawab yang berkaitan dengan aktivitas produksi timah dari produk bijih timah yang mereka beli dari para penambang. Selain itu, mereka bisa memangkas biaya produksi dan biaya operasional perusahaan seperti asuransi, transportasi pekerja, pajak, dan reklamasi.

Misalnya terhadap dampak lingkungan, jika berkaca dengan apa yang terjadi di Bangka, pihak perusahaan biasanya melakukan reklamasi ala kadarnya terhadap lahan bekas tambang, yakni hanya untuk berlandung dari tuduhan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan pertambangan mereka. Sementara para elit penambang yang ilegal sering kali meninggalkan apa adanya kerusakan tersebut dan beberapa kejadian untuk meloloskan diri dari tanggung jawab secara hukum mereka (termasuk pihak perusahaan) bermain dengan petugas yang memiliki wewenang akan hal tersebut (hasil pengamatan selama penulis hidup di Bangka). Menyitir dari Bangka Pos, sering kali aparat pemerintah melakukan penertiban atau razia bagi penambang ilegal yang beroperasi bukan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, dari banyaknya kasus penertiban, para penambang ilegal tidak pernah berhenti karena beberapa hari sebelum kegiatan penertiban dilakukan mereka biasanya sudah mendapatkan bocoran informasi dari sesama penambang. Selain itu, beberapa waktu setelah penertiban dilakukan para penambang ilegal kembali beroperasi seperti semula dan tidak jarang mereka dibekingi oleh oknum atau aparat pemerintah itu sendiri sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum maupun pengawasan di lapangan.

Cara-cara atau pola-pola meloloskan diri dari tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan seperti itu tergolong rasional bagi mereka, sebab dengan begitu langkah mereka untuk melanjutkan proses eksploitasi terhadap timah menjadi berjalan sebagaimana perhitungan yang tentu sudah mereka rumuskan sebelumnya. Hemat peneliti, hal-hal seperti ini sudah menjadi salah satu prinsip manusia modern yang menggunakan rasionalitas instrumental. Bukankah prinsip rasionalitas instrumental adalah sejauh cara atau metode dapat dipakai menjadi alat manipulasi, manusia rasional merasa puas karena baginya tujuan pengetahuan rasionalnya telah tercapai di dalam cara (Hardiman, 1990). Sebagai gambaran dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Bangka, berikut penulis cantumkan dua potretanya:



(sumber dokumentasi: hasil pencarian di google terkait jejak bekas galian tambang timah tahun 2021)

Dua gambar yang sudah diperlihatkan di atas merupakan potret kerusakan lingkungan akibat pertambangan di darat, yakni lubang-lubang (kolong) yang saat ini banyak menghiasi daratan pulau Bangka. Selain itu, pertambangan yang dilakukan di sungai dan di laut juga sama merusaknya. Di beberapa sungai, bahkan para elit melakukan pertambangan di wilayah yang dipenuhi hutan bakau dan di hulu sungai. Jelas hal ini sangat merusak lingkungan. Hasil riset Yuliana (2017) di Provinsi Bangka Belitung menjelaskan, setelah dipicu hujan agak lebat, di sebagian besar wilayah atau tempat yang notabenenya mengalami kerusakan akibat pertambangan darat maupun sungai, sangat mudah dilanda banjir. Salah satu contohnya peristiwa banjir yang terjadi pada beberapa daerah di Bangka pada tanggal 8-21 Februari tahun 2016 yang lalu. Sementara di laut, pertambangan dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) dan TI Apung mengakibatkan laut menjadi tercemar dan merusak ekosistem laut hingga pada akhirnya yang menjadi korban adalah para nelayan. Beberapa nelayan di Bangka merasakan dampak dari aktivitas KIP dan TI Apung di Laut membuat hasil tangkapan mereka berkurang drastis, contoh nelayan di Dusun Selindung dan beberapa wilayah di Kecamatan Pari Tiga Kabupaten Bangka Barat (Aimi, dkk. 2015; Sarpin, dkk., 2021).



(Gambar Ponton timah ilegal di salah satu Lokasi laut Bangka Belitung/sumber dari dokumentasi detik.com, 2021)



(Kawasan hutan mangrove di Teluk Kelabat, Belinyu, Kab. Bangka yang rusak akibat dari aktivitas pertambangan/sumber:dokumentasi detik.com, 2025)

Apakah selama ini para penambang maupun pemerintah sangat peduli akan hal itu? berdasarkan pengamatan tim penulis, sejauh ini baik Pemerintah, Perusahaan, maupun para elit pertambangan lainnya cenderung sekadar peduli saja terhadap persoalan ini, termasuk terhadap para nelayan. Seperti yang tim penulis singgung sebelumnya, semua pihak yang terlibat itu sadar bahwa cara tersebut (bertambang secara massif di darat, laut dan sungai) merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan timah secara besar-besaran agar keuntungan yang mereka dapatkan juga besar, sekalipun mengorbankan lingkungan, para nelayan dan masyarakat lainnya. Inilah praktik dari prinsip rasionalitas instrumental.

Setelah mengetahui bagaimana masifnya pertambangan timah dilakukan di berbagai sektor di Pulau Bangka, pertanyaan bersama yang kemudian muncul, apakah pengaruh dari penghasilan ataupun eksploitasi sumber daya timah tersebut bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Bangka secara luas? Berdasarkan fakta yang terjadi di Bangka sejauh ini, rasanya sulit untuk mengatakan hasil eksploitasi terhadap sumber daya timah telah memberi kesejahteraan pada masyarakat Bangka secara luas. Faktanya, keberadaan dan adanya sistem pertambangan timah selama ini cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber daya timah. Seperti yang penulis singgung sebelumnya, yaitu para elit lokal, pengusaha timah, pemerintah dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa fenomena di Bangka ini merupakan contoh ataupun refleksi nyata dari pemikiran Adorno dan Horkheimer yang mengatakan bahwa rasionalitas, positivisme dan produknya (sistem, teknologi yang canggih dan sebagainya) yang netral itu memungkinkan dimanfaatkan siapa saja dan untuk kepentingan apa pun, sehingga rasio kehilangan tujuan dari dirinya sendiri. Akhirnya, pembebasan tidak terjadi. Sebab, rasionalitas instrumental dipakai pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri dan itu tidak untuk maksud menciptakan 'emansipatoris' terhadap masyarakat, tapi malah merusak dan mendominasi lingkungan/alam serta memudahkan manipulasi terhadap manusia lainnya.





(Gambar yang memperlihatkan bagaimana para pekerja tambang di lapangan. Mereka bekerja dengan penuh risiko dan dominasi halus, sementara para kapitalislah yang mendapatkan keuntungan dari proses eksploitasi ini. (sumber dokumentasi tim peneliti))

b. Rasionalitas Pencerahan sebagai Sebuah Mitos Baru

Pertambangan timah dengan teknologi yang canggih dan cara-cara yang katanya efektif dan efisien seperti yang berlangsung di Pulau Bangka nyatanya tak memberi kemajuan kepada masyarakat di Bangka sebagaimana semestinya. Hal tersebut menunjukkan relevansi dengan apa yang sudah diungkap oleh Horkheimer, Adorno maupun Marcuse dalam tulisan-tulisan mereka (Baca: "*Dialectic of enlightenment*", maupun "*One Dimensional Man*"), bahwa rasionalitas hasil pencerahan (instrumental maupun rasionalitas teknologis) yang kemudian melahirkan teknologi dan alat-alat yang canggih-canggih di era modern, nyatanya tidak memperoleh kemajuan apa-apa karena menampilkan sifat mitos kembali. Rasionalitas pencerahan laiknya pemahaman mitos sebelumnya (primitif), yakni pada hakikatnya masih bersifat buta, tidak kritis dan repetitif. Tidak hanya itu, menurut Adorno dan Horkheimer dalam rasionalitas pencerahan ini, pikiran kita menjadi mati, menjadi benda atau alat yang hanya dipakai untuk mengkalkulasi objek-objeknya, misalkan alam dan manusia lainnya (Hardiman, 1990; Agger, 2017). Dengan demikian, maka tidak mengherankan jika harapan munculnya rasionalitas ini untuk memerdekakan manusia secara manusiawi atau membebaskan dan mensejahterakan manusia tidak pernah terwujud. Sebab, dengan rasionalitas seperti itu pikiran manusia dikendalikan dan dibekukan untuk saling memanipulasi. Di sisi lain juga manusia berlomba-lomba mengeksploitasi alam dengan rasio pencerahan yang ia miliki. Oleh karena itu, kebebasan dan kesejahteraan manusia jelas hanya akan menjadi harapan atau bersifat mitos belaka.

Lebih lanjut Horkheimer dan Adorno mengungkapkan alasan mengapa cara berpikir hasil pencerahan adalah tak lain dari mitos baru yang menang dalam sejarah atas mitos yang lama, yakni singkatnya, menurut mereka pada saat munculnya pemikiran rasionalitas pencerahan, pemikiran tersebut membebaskan masyarakat dari cara berfikir metafisis. Akan tetapi ketika positivisme meraja lela dan menghasilkan *Zweckrationalität* (rasionalitas instrumental), positivisme menjadi ideologi baru pengganti pemahaman metafisis yang oleh positivisme dianggap "ideologis" karena tak dapat diverifikasi kebenarannya.

c. Jalan Buntu Teori Kritis Generasi Pertama dan Kungkungan Epistemologis Manusia dalam Memandang Sumber Daya Timah

Apa yang telah dilakukan oleh Adorno, Horkheimer maupun Marcuse (teori kritis generasi pertama), baik dalam karya *Dialectic of enlightenment* maupun *One Dimensional Man* adalah suatu kritik radikal atas positivisme dan saintisme (rasionalitas instrumental dan rasionalitas teknologis) yang menurut mereka telah meresapi dasar-dasar kesadaran masyarakat modern. Di dalam arti ini teori kritis yang dicananangkan di dalam manifesto 1937 berhasil membuka selubung ideologis dari saintisme (Hardiman, 1990). Namun kritik-kritik yang mereka lakukan itu masih bersifat moralistik dan mereka sebenarnya belum cukup merefleksikan masalah positivisme maupun saintisme itu secara epistemologis. Secara epistemologis mereka justru menghadapi pesimisme total terhadap

teori kritis mereka sendiri. Dengan mengatakan bahwa rasio kritis dapat membeku menjadi ideologi baru atau rasio instrumental sebagai hasil pencerahan sebagai mitos baru dan dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi “ideologis” dan mendarah daging di dalam bentuk rasionalitas teknologis, Generasi Pertama teori kritis menemui jalan buntu (Hardiman, 1990; Magnis Suseno dalam Sindhunata, 1983).

Horkheimer dan Adorno seperti tak melihat adanya jalan keluar bagi masyarakat yang dikritiknya sendiri. Seperti halnya dalam kasus eksploitasi timah di Pulau Bangka oleh pihak-pihak yang sudah penulis kupas sebelumnya, tak ada jalan keluar untuk merubah kondisi itu. Sebab dimensi epistemologis atau cara pandang mendasar dari manusia-manusia yang terlibat dalam proses eksplorasi timah ini sudah semacam terkonsensus untuk memiliki pola yang sama dalam memposisikan sumber daya timah sebagai objek total untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka, khususnya kepentingan ekonomi. Sulit memunculkan nalar kritis sebagai lawan dari rasionalitas instrumental maupun rasionalitas teknologis tersebut. Sebab jika melawan itu manusia akan merasa nalar mereka tak irasional, sehingga akhirnya dimensi epistemologis manusia modern tetap tumpul, adaptif, instrumental dan ideologis.

KESIMPULAN

Eksplorasi sumber daya timah lewat pertambangan di darat, sungai dan laut di Pulau Bangka merupakan salah satu contoh fenomena penggunaan rasionalitas instrumental oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi, ilmu alam, ekonomi, kebijakan politik dan lain-lainnya. Pihak-pihak tersebut di antaranya orang-orang dari perusahaan tambang (PT. Timah, Tbk maupun PT. Koba Tin), elit penambang ilegal, pemerintah bahkan sampai kepada rakyat menengah ke bawah. Pada dasarnya eksploitasi tersebut tidak hanya terhadap alam, namun juga terjadi terhadap manusia lainnya (rakyat-rakyat kecil ataupun masyarakat yang hidup tidak jauh dari daerah pertambangan). Aktivitas pertambangan tersebut jika dilihat dari perspektif pemikiran teori kritis generasi pertama, dapat dikatakan tak menghasilkan kemajuan seperti yang seharusnya. Dengan kata lain, sumber daya timah yang melimpah ruah tersebut tidak membuat masyarakat di Bangka benar-benar sejahtera atau bebas dari penindasan. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi, menurut Adorno dan Horkheimer lantaran rasionalitas instrumental yang sifatnya netral, sehingga bisa digunakan oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun, dan pada akhirnya rasionalitas pencerahan tersebut tak memperoleh kemajuan apa pun. Ia menjadi mitos baru yang menang dari mitos yang ada sebelumnya.

Kendati pun kritik terhadap rasionalitas pencerahan oleh tokoh-tokoh generasi pertama teori kritis ini bersifat radikal, nyatanya kritik mereka masih dalam tataran moralistik atau dengan kata lain hasil pemikiran mereka belum cukup merefleksikan masalah-masalah itu secara epistemologis. Secara epistemologis pemikiran mereka justru menghadapi pesimisme total. Mereka menghadapi jalan buntu sehingga teori dengan maksud emansipatoris dari generasi pertama menghadapi kerumitan dan menjadi ditinggalkan para pendukungnya. Adorno, Horkheimer maupun Marcuse semacam tak melihat adanya jalan keluar bagi objek yang mereka kritisi. Oleh sebab itu juga, ketika memakai kerangka pemikiran teori kritis generasi pertama dalam melihat kasus eksploitasi terhadap timah yang berlangsung sejak lama di pulau Bangka, maka penulis juga tak yakin ada jalan keluar yang bisa merubah kondisi tersebut. Sebab, cara pandang manusia-manusia (dalam dimensi epistemologis) atas sumber daya alam timah itu sendiri semacam hanya ada satu dimensi yakni objektivikasi secara total.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sultan. (2024). *Tiga Terdakwa Korupsi Timah Diancam 8 Tahun Penjara*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/tiga-terdakwa-korupsi-timah-diancam-8-tahun-penjara-1179373>
- Agger, Ben. (2017). *Teori Sosial Kritis (Mazhab Frankfurt, Karl Marx, Cultural Studies. Teori Feminis, Derrida, Postmodernitas)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Aimi, Zulkarnain dan Fakrurrozi. (2015). Model Kebijakan Sumber Daya Kelautan Dalam Perspektif Resolusi Konflik (Studi Kasus Nelayan Teluk Limau Bangka Barat). *Jurnal Bumi Lestari*, Vol 15, No. 2.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approachs (4th ed.)* Thousand Oaks, CA: SAGE Pubication, Inc.
- Fadly S. O., Multiwijaya R. V., & Suar A. (2024). Tindak Pidana Kejahatan Korporasi dalam Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung. *Ensiklopedia of Journal*, 4 (6), 207-221.
- Erman, E. (2010). Aktor, akses dan politik lingkungan di pertambangan timah Bangka. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 71-101.
- Hardiman, Budi, F. (1990). *Kritik Ideologi (Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Horkheimer, M, And Adorno, W, T (Translated by Edmund Jhepshot). (2002). *Dialectic of Enlightenment (Philosophical Fragments)*. California: Stanford University Press.
- Ibrahim, Haryadi D., Wayudin N. (2018). From Charm to Sorrow: The Dark Portrait of Tin Mining in Bangka Belitung, Indonesia. *People: International Journal of Social Sciences*, 4 (1), 360-382
- Ibrahim, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 1(1), 76-89.
- Irawan, Rudi dkk. (2014). Stakeholder Management: Confllict And Interest In Tin Mining Insutry Indonesia (Case Study Bangka Belitung Province). *Europian Scientific Journal*. Vol. 10, No. 25
- Kamil, Irfan. (2024). Kasus Timah, Eks Kadis Pertambangan Babel Didakwa Rugikan Negara Rp. 300 T. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/15364601/kasus-timah-eks-kadis-pertambangan-babel-didakwa-rugikan-negara-rp-300-t>
- Kartiningrum, E.D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Mahendra, Arya Bima. (2024, 12 Maret). DLHK Babel Temukan 90 Persen Tambang Ilegal Pakai Alat Berat, Oknum APH Jadi Hambatan Penertiban. *Bangkapos.com*. <https://bangka.tribunnews.com/2024/03/12/dlhk-babel-temukan-90-persen-tambang-ilegal-pakai-alat-berat-oknum-aph-jadi-hambatan-penertiban>.
- Mercuse, Herbert. (1991). *One Dimensional Man. Studies in the ideology of Ideology of Advanced Society*. Boston: Beacon.
- Nazir, Moh. (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, B., dkk. (2010). *Timah Babel diantara Globalisasi dan Glokalisasi (Analisis Regulasi, Deksprisi Aktor, dan Desain Rekomendasi)*. Bangka: UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung.
- Sarpin, Ibrahim I., & Herza H. (2021). *From Conflict to Alternative Solution: a Case Study of Local Inhabitants' Resistance to Tin Mining in Sleindung Village, Bangka Barat*. Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities. Vol. 4, No. 2.
- Sindhunata. (1983). *Dilema Usaha Manusia Rasional (Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt)*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta
- Wijayanto, H. A. A., Susiatiningsih, H., & Wahyudi, F. E. (2017). 3. Fenomena Penyelundupan Timah Indonesia ke Luar Negeri. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(2), 17-26.
- Yuliana, H.S. (2017). Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat terhadap Bencana Banjir (Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*. Vol. 3, No. 1